

KONSEP PENATAAN KAWASAN SUCI MARGI AGUNG PURA BESAKIH (SUATU KAJIAN LATAR BELAKANG FILOSIFIS)

Oleh:

I Gusti Bagus Oka

Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Udayana
Email: igboka@yahoo.com

ABSTRAK

Pura Besakih merupakan pura terbesar di Bali. Jalan utama atau margi agung menuju ke pura, posisinya simetris dengan candi bentar atau gerbang utama dari Pura Penataran Agung. Gerbang tersebut merepresentasikan keagungan, kesucian dan kekeramatan dari kawasan suci ini.

Kawasan permukiman yang berlokasi di kiri - kanan margi agung kadang-kadang menimbulkan permasalahan yang dapat mencemarkan kawasan ini, khususnya saat penyelenggaraan kegiatan upacara yang ditujukan untuk para leluhur (pitra yadnya) penduduknya. Disamping itu terganggunya kelancaran dan kenyamanan lalu lintas menuju pura, disebabkan karena adanya berbagai kombinasi sirkulasi seperti pemedek, wisatawan, dan prosesi upacara itu sendiri yang dilangsungkan di margi agung.

Hasil pengkajian yang dilakukan menunjukkan bahwa margi agung kawasan suci Besakih merupakan sumbu utama yang sakral dan merupakan pusat orientasi bagi permukiman disekitarnya. Disamping itu perlu dilakukan penataan kembali kios-kios disepanjang margi agung.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah tetap menjaga kelestarian, kesakralan dan kesucian margi agung kawasan suci Besakih.

Kata Kunci: margi agung, candi bentar, dan kawasan suci,.

ABSTRACT

Besakih temple is the greatest temples in Bali. The main road or margi agung leading to the temple, located in a symmetrical axis with candi bentar or main gate of the Penataran Agung Temple, as an exit gate. This gate is representing the greatness, holiness, and sacredness of this holy area.

Residence area which located in left and right side if this margi agung, sometime create some problem because that is, some think could be given result in disgrace of this holy area, especially when the people in this residence establishing a ceremonial event subjected to their forefather. In addition, there are many others problem which can disturb the smoothness and the pleasantness of the traffic toward the temple, caused by combined circulation such as pemedek, tourist, and ceremonial procession itself, which done in margi agung.

The result shows that main road of Besakih holy area is a sacred main axis and main orientation for housing around them. The other hand, we need restructuring kiosks all along margi agung.

So I suggest that we must keep conservation, holiness, and sacredness of main road of Besakih holy area.

Key Word: main road, main gate, and holy area.

PENDAHULUAN

Penduduk Pulau Bali terdiri dari campuran dari berbagai etnis dan agama, namun sebagian besar memeluk Agama Hindu. Dalam Agama Hindu, Tuhan Yang Maha Esa tidak berwujud (*impersonal God*), sangat luhur (*trancendent*), meresapi serta memenuhi segala-galanya di jagat raya ini (*vyapivyapaka*), hal-hal ini sangat sulit untuk dipahami oleh umat pada umumnya. Pemahaman terhadap Tuhan seperti ini terbatas hanya pada kalangan *vipra* atau *jnanin*, yakni orang-orang yang sangat tinggi pengetahuannya dibidang *Brahmatattva* (pengetahuan tentang Tuhan), dan para *yogi* (orang yang telah menempuh jalan yoga), yang menempuhnya melalui *Jnana* (pengetahuan tentang Tuhan) dan *Yoga Marga* (salah satu jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan) (Titib, 1993: 1).

Bagi masyarakat awam pada umumnya, jalan yang paling mudah ditempuh dan dipahami adalah *Bhakti Marga* maupun *Karma Marga*. Jalan *Bhakti* adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa diantaranya melalui pelaksanaan sembahyang, melakukan *Japa* (pengucapan kata-kata suci secara berulang-ulang) dan melaksanakan *Tirthayatra* (perjalanan suci). Sedangkan Jalan *Karma*, disamping melakukan karya yang dilandasi hati yang tulus ikhlas, juga diantaranya dengan mempersembahkan berbagai upacara atau *Yajna* (pengorbanan suci).

Sembahyang adalah salah satu wujud kebhaktian umat Hindu kepada Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widhi, para dewa, manifestasinya, para leluhur atau roh-roh suci para maharsi (orang-orang yang teramat suci), para guru kerokhanian yang telah mencapai tingkat kedewataan, yaitu suatu tingkat yang setara dengan dewa dengan cara melaksanakan persembahyangan. Melalui persembahyangan umat Hindu memuja kebesaran, keagungan dan kemahakuasaan-Nya. Sang Hyang Widhi Maha Kuasa di dalam filsafat ke-Tuhanan (*Brahmavidya*) dinyatakan tidak terjangkau oleh kemampuan pikiran dan perasaan (*acintya*), tidak dapat digambarkan

dalam pikiran (*niranjana*), tidak dapat ternoda dan maha suci dan lain sebagainya. Di dalam buku *Bhakti Marga* dan *Karma Marga* ini Tuhan Yang Maha Esa dipahami sebagai yang berwujud (*personal God*), disimboliskan melalui berbagai bentuk diantaranya *arca*, *pratima* (salah satu bentuk simbol Tuhan) ataupun melalui *daksinasthana* (tempat bersemayamnya Tuhan dalam bentuk simbol) dan kemudian dipersembahkan beraneka upacara dan *upakara yadnya* disertai dengan acara persembahyangan.

Untuk melakukan persembahyangan dan berbagai upacara serta *upakara yadnya* tersebut memerlukan tempat, yaitu berupa pura yang salah satu di antaranya adalah Pura Besakih sebagai salah satu pura terbesar di Pulau Bali, sebagai tempat bersemayamnya Tuhan (manifestasi Tuhan).

Pura Besakih sebenarnya sudah ada sebelum kedatangan Empu Kuturan ke Bali yang membawa banyak perubahan tata keagamaan, mengajarkan membuat *Sad Kahyangan Jagat* (enam pura yang dipuja oleh seluruh umat Hindu, yaitu Lempuyang, Goa Lawah, Uluwatu, Watukaru, Pucak Mangu dan Besakih), *Kahyangan Catur Lokapala* (empat pura yang dianggap memegang empat penjuru angin), *Kahyangan Rwabhineda* (dua pura yang tertinggi, yaitu Pura Batur dan Pura Besakih) dan memperbesar Pura Besakih dengan mendirikan palinggih *meru* (tempat Tuhan berstana yang beratap bertingkat), *gedong* (tempat Tuhan berstana yang berbentuk bangunan beratap dan berinding) dan lain sebagainya.

Di sekitar Pura Besakih ini terdapat banyak sekali pura yang masih mempunyai kaitan erat dengan Pura Besakih, yaitu Pura Pasimpangan, Pura Dalem Puri, Pura Manik Mas, Pura Bangun Sakti, Pura Goa, Pura Ulun Kulukul, Pura Merajan Selonding, Pura Banua Kawan, Pura Merajan Kanginan, Pura Jenggala (Hyang Galuh), Pura Basukihan, Pura Batu Madeg, Pura Kiduling Kreteg, Pura Gelap, Pura Pangubengan, Pura Tirta, Pura Paninjoan dan Pura Padarman.

Keseluruhan wilayah yang menjadi lokasi pura-pura ini dinamakan kawasan suci Besakih dengan *margi agung* (jalan suci yang

dilalui sewaktu prosesi upacara) yang tepat berada pada sumbu simetris *candi bentar* (pintu masuk yang berbentuk candi yang dibelah dua). Pura Penataran Agung sebagai pintu masuk menunjukkan keagungan, kesucian dan kesakralan kawasan suci itu.

Pada saat upacara besar di Pura Besakih, *margi agung* ini seringkali berubah menjadi kawasan perdagangan dengan deretan kios-kios sepanjang *margi agung*, dan juga sebagai tempat sirkulasi dan sekaligus sebagai tempat parkir para *pemedek* (umat) yang datang ke Pura Besakih untuk bersembahyang. Selain melewati *margi agung*, ada jalan lain menuju Pura Besakih yaitu melewati Pura Dalem Puri, menuju Pura Penataran Agung yang banyak membantu kelancaran pada saat upacara besar. Kekurang lancar sirkulasi terutama disebabkan oleh kekurangan tempat parkir, sehingga memakai badan jalan untuk tempat parkir.

Disamping merupakan lingkungan pura, kawasan suci Besakih ini juga mencakup lingkungan pemukiman yang berada di kiri kanan *margi agung*. Lingkungan pemukiman yang berada disebelah kiri *margi agung* pada umumnya tidak mengalami masalah dalam berbagai hal sirkulasi, tetapi lingkungan pemukiman yang berada di sebelah kanan *margi agung*, menghadapi masalah yang cukup besar.

Disamping keterpaksaan menggunakan *margi agung* sebagai sirkulasi-kehidupan sehari-hari, juga terdapat kesulitan dalam pelaksanaan prosesi *Upacara Pitra Yadnya* (upacara dalam kaitannya dengan kematian), yang secara etika Hindu tidak membolehkan orang melewati *margi agung* yang sakral, sehingga penduduk terpaksa mencari jalan setapak yang sempit dan seringkali susah untuk dilalui.

Dari latar belakang seperti tersebut dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi, yaitu; (1) Tergabungnya sirkulasi prosesi *Upacara Dewa Yadnya* (upacara suci dalam kaitannya dengan pemujaan Tuhan dan sinar-Nya) di Pura Besakih dan sirkulasi pariwisata serta sirkulasi penduduk, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan prosesi upacara, terutama prosesi *Upacara Pitra Yadnya*, pada *margi agung* yang sakral; (2) Prosesi upacara kematian (*pitra yadnya*), di mana menurut etika

Hindu yang didasari oleh filsafat ajaran Agama Hindu, tidak boleh melalui *margi agung* yang telah dikeramatkan, karena merupakan tempat sirkulasi prosesi *dewa yadnya*; dan (3) Pada waktu upacara di Pura Besakih, sering terjadi kemacetan lalu lintas, yang tidak saja mengganggu kenikmatan para wisatawan, tetapi juga para *pemedek* dan kelancaran prosesi upacara.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat diajukan rumusan masalahnya, yaitu “ Bagaimana memadukan tiga kepentingan yang berbeda di dalam satu wadah yang sama sedemikian rupa, sehingga masing-masing kepentingan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, tanpa saling mengganggu, dengan tetap mengutamakan prosesi upacara *dewa yadnya* ?”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebudayaan

Ada banyak konsep tentang kebudayaan dalam ilmu antropologi apalagi dalam semua ilmu yang berkaitan dengan manusia dan kebudayaannya. Pengertian kebudayaan sangatlah luas, mendalam serta mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia dengan alam sekitarnya.

Poespowardojo menyebutkan bahwa kebudayaan menunjukkan sesuatu pengertian yang luas dan kompleks. Di dalamnya tercakup segala sesuatu, baik yang terjadi di dalam dan dialami oleh manusia secara personal dan secara kolektif maupun bentuk-bentuk yang dimanifestasikan sebagai ungkapan pribadi seperti yang dapat disaksikan dalam sejarah kehidupan, baik berupa hasil-hasil pencapaian yang pernah ditemukan oleh umat manusia dan diwariskan secara turun temurun maupun proses perubahan serta perkembangan yang sedang dilalui dari masa ke masa (Poespowardojo, 1993:1)

Pada tahun 1871, E.B. Tylor mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, meliputi pengetahuan, keperluan, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan oleh manusia sebagai anggota

masyarakat (White, 1973: 25). Tylor juga menegaskan bahwa budaya adalah sesuatu yang ditransmisikan melalui sarana bukan genetik.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa “Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan kemasyarakatan yang dijadikan miliknya dengan belajar” (Koentjaraningrat 1996: 71). Clifford Geertz (1973) mengatakan “.....paling baik kebudayaan (kompleks dari pola-pola kelakuan yang nyata yang terdiri atas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi) sebagai seperangkat mekanisme kontrol, rencana-rencana, resep-resep, petunjuk-petunjuk dan sebagainya untuk mengendalikan kelakuan”. Marvin Harris (1968) menekankan teknologi sebagai esensi dari kebudayaan. Teknologi dilihatnya sebagai alat menjelmakan berbagai corak pengelompokan sosial yang serupa yang menentukan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manusia dengan perantara sistem nilai dan kepercayaan yang relatif sama.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa wujud kebudayaan umumnya dibagi menjadi tiga katagori, yaitu: (1) Kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, ataupun di foto. Bila gagasan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan barulah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Lapisan yang paling abstrak adalah sistem nilai budaya. Norma-norma sebagai lapisan kedua lebih konkrit, dan yang lebih konkrit lagi adalah sistem hukum yang berdasarkan norma-norma, lebih konkrit lagi adalah lapisan adat dan terbatas ruang lingkupnya adalah aktivitas kehidupan manusia sehari-hari; (2) Sistem sosial, bersifat konkrit dapat terjadi di sekeliling kita sehari-hari, dapat diobservasi, di foto, dan di dokumentasi. Sistem sosial merupakan aktivitas kehidupan di setiap saat menurut pola-pola tertentu yang didasarkan atas adat tata kelakuan; (3) Wujud fisik, bersifat paling konkrit, dapat diraba, dilihat dan di foto, merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat (Koentjaraningrat 1974 : 15-16).

Selanjutnya wujud kebudayaan seperti tersebut di atas direvisi dan dikembangkan oleh Koentjaraningrat menjadi empat katagori, yaitu: (1) Artefacts, atau benda-benda fisik, penjelasannya sama dengan wujud fisik kebudayaan; (2) Sistem tingkah laku dan tindakan berpola, penjelasannya sama dengan sistem sosial; (3) Sistem budaya, penjelasannya sama dengan kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (4) Nilai-nilai budaya, yang menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berpikir, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan (Koentjaraningrat 1996: 74).

Berdasarkan wujud kebudayaan seperti tersebut, Koentjaraningrat merumuskan unsur-unsur kebudayaan yang terdiri dari: (1) Sistem religi dan upacara keagamaan; (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3) Sistem Pengetahuan; (4) Bahasa; (5) Kesenian; (6) Sistem mata pencaharian hidup; dan (7) Sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat 1974: 12).

2. Masyarakat Hindu

Pada umumnya masyarakat Hindu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) Kelompok yang percaya dengan *Panca Srada* yaitu percaya dengan adanya *Tuhan, Atma, Punarbhawa, Karma* dan *Moksa*; (2) Kelompok yang setiap perilakunya mencerminkan *Tat Twam Asi*, sehingga umat Hindu akan cepat berinteraksi, bersosialisasi dan beradaptasi; (3) kelompok yang mencerminkan pelaksanaan konsep *Karma Marga* yaitu perilaku pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih; (4) kelompok yang mempunyai naluri seni, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Agama Hindu (Triguna dkk, 1993: 31-33).

Sedangkan stratifikasi sosial yang dicerminkan dengan adanya konsep *warna* dalam masyarakat Hindu, lebih didasarkan atas *guna* dan *karma* (Triguna dkk, 1993 dan Wiana dkk, 1993), dalam kenyataannya pembedaan anggota masyarakat dalam struktur tertentu dianggap sebagai gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh Sanderson yang mengatakan bahwa ketidaksamaan sosial adalah

hal yang universal dalam masyarakat manusia, karena itu tidak ada masyarakat tanpa perbedaan antar individu (Sanderson 1995: 145). Hal inilah yang menentukan stratifikasi sosial, yang dapat saja didasarkan atas garis keturunan, kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya.

3. Perubahan Kebudayaan

Sistem sosial kultural merupakan sekumpulan orang yang menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang bertindak menurut bentuk-bentuk perilaku sosial yang sudah terpolakan, dan menciptakan kepercayaan dan nilai bersama yang dirancang untuk memberi makna bagi tindakan kolektif mereka (Sanderson, 1995: 59). Prosedur yang dikembangkan oleh Marvin Harris mengenai skema kompartementalisasi, merupakan penguatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Marx mengenai perbedaan antara infra struktur dan super struktur. Komponen-komponen dasar sistem sosio kultural adalah super struktur ideologis yang terdiri dari ideologi umum, agama, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, struktur sosial yang terdiri dari ada tidaknya stratifikasi sosial, ada tidaknya stratifikasi rasial dan etnis, kepolitikan, pembagian kerja menurut seksual dan ketidaksamaan secara seksual, keluarga dan kekerabatan dan pendidikan, dan yang terakhir adalah infra struktur material yang terdiri dari teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi (Sanderson, 1995: 60).

Menurut pendekatan teori klasik, bahwa kebudayaan akan dimulai dari super struktur, yaitu sistem budaya (atau nilai dan sistem budaya) yang merupakan gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh pendukung kebudayaan sejak usia dini, yang akan menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berpikir serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan, yang pada akhirnya menghasilkan benda yang diciptakan oleh manusia.

Perubahan sosio kultural menurut pendekatan teoritis materialis, adalah bahwa infrastruktur masyarakat merupakan penentu utama bagi strukturnya, dan pada giliran berikutnya struktur merupakan penentu super strukturnya.

Perubahan kebudayaan ditinjau dari pandangan Kingsley Davis disebutkan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas, akan tetapi perubahan kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial. Dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, yang disebabkan karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat (Soekanto, 1990: 341).

Sumardjan menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkutan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Soekanto, 1990: 343).

Diterima atau ditolaknya perubahan kebudayaan oleh masyarakat, oleh Neifhoff dikatakan akan dipengaruhi oleh tingkat laku pembaharu, motivasi penerima, dan tingkah laku yang berasal dari sifat pola kebudayaan lama masyarakat setempat (Sayogyo, 1990: 58-60).

4. Arsitektur Tradisional

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang dinilai baik dan benar oleh masyarakat. Tradisional berarti tetap berpegang teguh pada norma-norma dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun (Kridalaksana dkk., 1995: 1068). Tradisi di Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Hindu, yang merupakan nilai-nilai budaya masyarakat Bali. Konsep-konsep yang sangat mempengaruhi kebudayaan yang pada akhirnya mempengaruhi Arsitektur Tradisional Bali adalah konsep: *Rwa Bhineda*, *Tri Hita Karana*, *Bhuana Agung dan Bhuana Alit*. Dalam konsep *Rwa Bhineda* (Lontar Asta Kosali, Nomor 1.04.A, hal. 12) dikatakan *Ang*, *Ah* adalah aksara yang merupakan suara burung merdu. Huruf *Ang* adalah simbol dari *Sang Hyang Prajapati*, sedangkan *Ah* adalah simbol dari *Bhagawan Wiswakarma*. Konsep *Rwa Bhineda* ini

diimplementasikan kemudian dengan konsep *luan-teben* atau konsep hulu-hilir.

Konsep *Tri Hita Karana*, tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dengan manusia.

Konsep *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit* sebagai terapan lebih lanjut dari konsep *Tri Hita Karana*, yang selalu menjaga hubungan baik antara manusia dan lingkungannya, antara *Bhuana Alit* (mikro kosmos) dengan *Bhuana Agung* (makro kosmos). Untuk menjaga hubungan yang baik ini harus ada keselarasan antara *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*, karena unsur-unsur yang terdapat dalam *Bhuana Agung* akan ada juga dalam *Bhuana Alit*, begitu juga sebaliknya.

Lingkungan fisik dalam bentuk teritorial atau pekarangan pada dasarnya di bagi tiga kawasan yang disebut dengan istilah *trimandala*, sedangkan sosok fisik bangunan juga pada dasarnya dibagi tiga yang disebut *triangga* (Kaler, 1982: 86-89). Penyediaan ruang terbuka atau halaman tengah (*natah*) merupakan media perpaduan antara unsur *akasa* (kebakapan/*purusa*) dan *pretiwi* (keibuan/*pradana*). Di samping puncak gunung, arah terbit matahari juga dipakai sebagai orientasi arah *utama*. Namun dari hasil penelitian tentang “Nilai-nilai Tata Letak Bangunan Dalam Rumah Tradisional Bali” (Putra, dkk., 1985: 43) menunjukkan bahwa sumbu gunung-laut (*kaja-kelod*) lebih dominan daripada sumbu terbit-tenggelam matahari.

Falsafah Arsitektur Tradisional Bali merupakan penyeimbang, penyelaras dan integritas tiga unsur yang merupakan sumber kesejahteraan (*Tri Hita Karana*), yaitu (1) ke-Tuhanan (*Parahyangan*), (2) manusia sebagai pemakai (*Pawongan*), dan (3) lingkungan fisik (*Palemahan*). Konsepsi keselarasan antara manusia dengan arsitektur, antara arsitektur dengan lingkungan baik fisik alami maupun buatan termasuk dalam inti arsitektur.

Upaya mempertahankan dan mengembangkan Arsitektur Tradisional Bali, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2, 3 dan 4 Tahun

1974 masing-masing tentang “Tata Ruang untuk Pembangunan’, Lingkungan Khusus”, dan Bangunan-Bangunan.

Perda Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Dati I Bali, mengatur tata ruang wilayah propinsi termasuk di dalamnya rencana penggunaan tanah dan pengaturan ketinggian bangunan.

Dalam Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 terdapat satu klausul yang berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan tradisional itu merupakan pancaran dan realisasi konsepsi idil berlandaskan ajaran agama, yang menentukan bahwa masing-masing tempat kediaman dan kesatuan lingkungan manusia pada hakekatnya adalah suatu *Bhuana Agung* (makro kosmos) yang serasi dan bersatu bahkan manunggal dengan diri manusia selaku penghuni selaku *Bhuana Alit* (mikro kosmos). Karena itu faktor-faktor yang esensial dari ide luhur itu, misalnya pada pengertian *hulu-teben*, *nista mandala*, *madya mandala* dan *utama mandala*, merupakan materi penting dalam peraturan itu dan peraturan organiknya”.

Mengenai pola desa, Bali mengenal dua tipe, yaitu Pola Linier (*hulu-teben*) yang biasanya terdapat pada desa-desa kuno yang pada umumnya terdapat pada Bali pegunungan, yang sering juga dimasukkan ke dalam Desa Bali Aga, dan pola *Perempatan Agung* (*catur patha*) yang pada umumnya terdapat pada desa Bali dataran yang masih dapat dikatakan merupakan desa yang masih muda.

Pola Linier dapat digambarkan sebagai sebuah desa yang dibagi menjadi dua oleh sebuah jalan besar yang membelah desa dari utara ke selatan, sehingga ada bagian desa yang berada di sebelah timur jalan dan ada yang berada di sebelah barat jalan. Pola ini dapat dijumpai pada desa kuno seperti Desa Panglipuran Bangli, Desa Julah Buleleng. Sedangkan Pola *Perempatan Agung*, digambarkan sebagai sebuah jalan yang membentuk jalan silang yang merupakan dua sumbu, yang pertama adalah sumbu utara-selatan yang merupakan sumbu utama, dan yang lainnya adalah sumbu timur-barat.

5. Sistem Transportasi Sebagai Bagian dari Pergerakan Sistem Penghubung

Sistem pergerakan merupakan faktor utama yang menentukan bentuk suatu lingkungan binaan. Dalam sistem ini bermacam-macam lalu lintas mengalir, bermacam-macam peruntukan terpisahkan. Menurut Trancik (1986) sistem penghubung adalah karakteristik yang sangat penting dari eksterior ruang kawasan. Hal ini adalah tindakan dimana kita menyatukan seluruh aktivitas dan akan menghasilkan bentuk fisik dari sebuah kawasan. Sebagai sebuah akibat, sistem penghitung diperhitungkan dengan membuat kesatuan besar yang ekstrim yang dapat dipahami dengan menghubungkan bagian-bagian pada kawasan yang bersangkutan. Berbagai aktivitas tersebut akan menentukan pola-pola pergerakan yang dipandang perlu untuk diarahkan melalui moda-moda dan sirkulasi yang saling mendukung serta terkait melalui satu kesatuan keterkaitan.

Pada kenyataannya dalam wujud nyata sistem penghubung menurut Danisworo (1992) pada dasarnya juga sistem yang menghubungkan berbagai jenis peruntukan lahan (*land use*). Sistem ini sangat vital untuk membuat fungsi-fungsi kawasan bekerja secara efisien. Dalam sistem ini jalur-jalur sirkulasi maupun sistem transportasi, baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki diwadahi. Dengan demikian semua aktifitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Secara fisik ruang kawasan binaan merupakan kumpulan dari beberapa bagian dari ruang-ruang sub kawasan bangunan. Sistem penghubung merupakan pengikat antara bagian tersebut. Sebagai suatu unit organisasi sosial yang besar, lingkungan arsitektur merupakan wadah interaksi sosial bagi segenap lapisan masyarakatnya. Oleh karenanya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem penghubung adalah (a) kemudahan pergerakan antar ruang ; (b) kemudahan saling berinteraksi bagi para pemakai; (c) adanya kecocokan antara kegiatan pemakai/penghuni dengan ruang yang mewadahnya.

6. Prinsip-prinsip Penataan Sistem Penghubung

Dalam perancangan arsitektur/ruang/kawasan binaan, sistem penghubung

menunjukkan hubungan multi dimensi dengan sistem lain, sehingga dengan demikian penataan sistem penghubung diselesaikan dengan cara multi dimensi juga. Roger Trancik (1986) memadukan tiga teori dalam satu kesatuan, yaitu *figure ground theory, linkage theory and place theory*, yang mengungkapkan tentang adanya struktur ruang dan sistem hubungan antara bagian ruang yang jelas serta tanggap terhadap kebutuhan manusia (*human needs*) maupun terhadap karakter (budaya, historis, konteks alamiah) setempat. Inti teori ini adalah pemahaman tentang budaya dan karakteristik suatu daerah yang ada dan telah menjadi ciri khas untuk dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan kawasan agar penghuni tidak asing dengan lingkungannya.

Dengan adanya dimensi sosial pada ruang pergerakan tersebut, ruang pergerakan tidak sekedar sebagai ruang semata tetapi merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan.

- a. **Penataan jalan**, prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah jalan harus merupakan elemen yang terbuka dan memiliki nilai visual yang positif, jalan harus dapat memberi orientasi bagi pemakai/pengemudi dan memberikan kejelasan lingkungan, sektor publik dan privat harus bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. **Penataan parkir**, yang merupakan salah satu sub sistem penghubung adalah merupakan sistem pendukung yang menentukan hidup tidaknya suatu kawasan. Menurut Shirvani (1985) beberapa cara yang dapat mengatasi masalah perparkiran antara lain; membuat dan menyediakan bangunan, pendekatan program pemanfaatan berganda, pengadaan parkir khusus bagi suatu kawasan dan pengadaan fasilitas parkir pada daerah perbatasan.
- c. **Penataan pedestrian**, adalah jalur khusus bagi pejalan kaki yang dapat berupa trotoar, *pavement, side walk, pathway* dan sebagainya.
- d. **Aktivitas pendukung**, elemen sistem penghubung lain yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas pendukung. Tujuan penataan harus berupa alokasi

kegiatan utama pada tempat yang paling fungsional dan paling disukai masyarakat, serta dikombinasikan dengan fungsi pelengkap dengan melalui jalur pedestrian yang aman unik dan menarik.

KEBERADAAN PURA AGUNG BESAKIH

Pura Besakih memang mempunyai perjalanan yang panjang, pura ini menjadi begitu sentral bagi masyarakat Bali, maka hadirnya berbagai legenda tentang orang-orang suci yang membangunnya, memperbaiki, menata kembali dapat dipahami kehadirannya.

Resi Markandeya disebut sebagai orang yang pertama kali menanam *panca datu* (lima bahan sebagai dasar bangunan) sebagai dasar pendirian Pura Besakih. Beliau datang ke Bali setelah merambah hutan lebat, sempat kembali ke Jawa untuk mencari *pengiring*, barulah sampai di Besakih (Agastia, 1993: 1).

Di samping itu cerita pengabdian penuh bhakti Sang Kulputih “tukang *sapuh*” di Besakih ditemui juga pada *Lontar* Sangkulpinge. Tetapi yang lebih memiliki fakta sejarah adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Mpu Kuturan yang kemudian dikenal sebagai pendiri *Sad Kahyangan* di Bali.

Mpu Baradah, saudara kandung Mpu Kuturan yang menjadi *Pandita* (pendeta) kerajaan Airlangga di Jawa Timur, untuk menata kembali Pura Besakih. Selanjutnya kehadiran Dang Hyang Nirartha (Dang Hyang Dwijendra) sebagai *padiksyan* atau *purohita* (pandita kerajaan) Kerajaan Gelgel di bawah Raja Waturenggong, besar peranannya dalam menata kembali kehidupan agama Hindu di Bali, termasuk menata kembali Pura Besakih dan tata upacaranya. Beliau menyarankan raja Waturenggong untuk menyelenggarakan Upacara *Ekadasarudra* di Besakih sekaligus dengan runtutan upacaranya, sebagaimana diwariskan kini.

Menurut Dr. R.Goris yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pura Besakih adalah kuil raja-raja Bali, dan dibangun oleh Wira Dalem Kesari. Menurut Goris yang

dimaksud dengan raja adalah Sri Kesari Warmadewa, raja yang memerintah Pulau Bali sekitar tahun 835 *Saka* atau 913 Masehi, yang dapat dilihat pada Prasasti Blanjong, Sanur. Raja Udayana Warmadewa yang memerintah bersama permaisurinya Sri Gunapriya Dharmapatni juga tetap menjadikan Pura Besakih sebagai pura terpenting di Kerajaan Bali. Setelah jatuhnya Kerajaan Bali ketangan Majapahit, Raja Gelgel sebagai pusat kerajaan di Bali tetap menjadikan Pura Besakih sebagai pura terpenting, yang dapat dilihat dari hubungan beberapa *meru* yang masih terkait dengan silsilah raja-raja Gelgel.



Keberadaan Pura Besakih Agung Besakih

Kesimpulan terakhir Goris adalah bahwa letak yang dewasa ini disebut sebagai pura, pada jaman pra sejarah adalah *limah* berundag. Sejak jaman Raja Sri Kesari (913 M) sampai raja Anak Wungsu (1049-1077 M) Pura Besakih menjadi tempat persembahyangan raja-raja silsilah Warmadewa. Sejak raja Gelgel yang pertama Pura Besakih dipergunakan untuk ibadah raja-raja silsilah Samprangan, Gelgel dan Klungkung. Pura Batumadeg dibangun pada waktu Marakatapangkaja turunan dari silsilah Dharmawangsa.

Pura Besakih sekarang adalah gugusan 86 buah pura, terdiri dari 18 pura umum, 4 pura *Catur Lawa*, 11 *Padharman*, 6 pura non

Padharman, 29 pura *Dadia* (pura keluarga), 7 pura berkaitan dengan pura *Dadia* dan 11 pura lainnya (Fox, 1987:84) yang kesemuanya merupakan hasil kemegahan arsitektur religius.

Pura Besakih dalam kedudukannya sebagai Pura *Kahyangan Jagat* memiliki fungsi: (1) Pura *Rwa Bhineda*, (2) Pura *Sad Kahyangan*; (3) Pura *Padma Bhuwana*; (4) Pura *Bhuta Hita*.

Untuk mencapai Pura Besakih terdapat *margi agung* yang dimulai dari *candi bentar* sebelum Pura Manik Mas sampai dengan sebelum *candi bentar* Pura Penataran Agung. *Margi agung* ini merupakan sepotong jalan yang harus dilalui pada waktu upacara yang prosesinya keluar dari Pura Besakih. Disamping *margi agung* berderet kios-kios yang menjual berbagai kerajinan tangan dari berbagai daerah di Bali.

Pemukiman penduduk juga terdapat di kawasan Pura Besakih yang dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu yang berada di daerah hulu dari *margi agung* yang bersifat *utamaning utama*, dan pemukiman yang berada di sepanjang *margi agung*, baik di sebelah kanan maupun kiri *margi agung*.

Kategori pertama adalah pemukiman yang berada di dusun (*pemaksan*) Batumadeg dan Kiduling Kreteg yang menurut RDTR Kawasan Suci Besakih berjumlah 119 unit. Dari 119 unit tersebut terdapat 161 KK, terdiri dari 72 KK (45 %) dari *Pemaksan* Batumadeg dan 89 KK (55 %) dari *Pemaksan* Kiduling Kreteg.

PENATAAN MARGI AGUNG KAWASAN SUCI PURA BESAKIH

1. Margi Agung sebagai Pusat Orientasi

Margi agung (jalan besar) adalah sepotong jalan yang bersifat sakral yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan prosesi upacara di Pura Besakih yang di sebelah kiri dan kanannya terdapat hunian yang merupakan *pemaksan* (pengelola) Pura Besakih, yang juga memanfaatkan *margi agung* ini sebagai daerah sirkulasi dalam kesehariannya, baik secara langsung menuju *margi agung*, maupun melalui *rurung-rurung* (gang-gang) kecil yang menghubungkan perumahan dengan *margi agung*.

2. Margi Agung dari Sudut Fungsi dan Makna

Margi agung adalah sebuah istilah lokal (daerah Bali) untuk menamai sebuah ruas jalan dengan fungsi selaku akses/pencapaian utama dari dan ke suatu kawasan. *Margi* atau *marga* berarti jalan, kemudian *agung* berarti besar. *Margi agung* adalah sebuah ruas jalan yang pada umumnya diistilahkan pada suatu kawasan pola pedesaan tradisional di Bali, dan merupakan jalan utama yang ada pada desa-desa dan pusat kota (kerajaan) di Bali. Sebagai jalur utama maka segi fisik keberadaannya tentu akan lebih luas/ lebar dimensinya.

3. Margi Agung Sebagai Daerah Sakral

Pura Besakih terdiri atas tujuh lapisan, dari lapisan pertama di bawah sampai lapisan teratas merupakan lapisan ketujuh yang merupakan pelataran kosong yang merupakan lambang *sunya loka* yang melukiskan Tuhan itu maha gaib dan *suksma* yang disebut juga Sang Hyang Embang.

Lapisan keenam terdapat dua bangunan kembar berbentuk *gedegongan* yang merupakan stana Ratu Pucak Kiwa dan Pucak Tengen yang merupakan lambang *Purusa* dan *Predana* yang diciptakan Tuhan paling awal yang terpengaruh oleh *Tri Guna* yaitu *Sattwam*, *Rajas*, dan *Tamas*.

Lapisan kelima ada empat bangunan yaitu dua bangunan *pepelik* dan dua bangunan pokok yaitu *meru tumpang solas* sebagai stana Ida sang Hyang Widi Wasa, *meru tumpang telu* sebagai stana Ida Ratu Ayu Mas Magelung.

Lapisan keempat terdapat *pelinggih* pokok berupa *meru tumpang solas linggih* Ratu Sunaring Jagat, *Pelinggih* Widyadara dan Widyadari, *Pelinggih* Sang Hyang Surya Candra, *Pelinggih* Ratu Subandar dan Ratu Ulang Alu.

Pada petak yang ketiga terdapat enambelas bangunan yang merupakan tokoh masyarakat perpaduan semua potensi yang merupakan karunia Tuhan, perpaduan tokoh masyarakat, pendeta dan raja yang merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan *waranugraha* Ida Betara.

Melalui *kori* akan ditemui lapisan yang kedua berupa Penataran Agung yang terdapat *Padma Tiga* untuk memuja *Sang Hyang Tri Purusa*. Dengan melewati 51 anak tangga dan melalui *candi bentar* akan dicapai lapisan yang pertama, yang mana dikanan kirinya terdapat patung-patung yang berperan dalam Mahabarata dan Ramayana.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama kebanyakan melaksanakan *Bakti Marga*, yang disebabkan oleh karena Tuhan adalah gaib, tidak dapat dipikirkan, oleh karena itu umat yang berhubungan dengan beliau maka beliau diwujudkan dalam bentuk *daksina* atau *pratima*. Anggapan seperti ini menyebabkan apa yang terjadi pada manusia bisa terjadi pada beliau, sehingga beliau dapat terkena leteh, kalau jalan untuk beliau ternoda maka beliau pun ternoda. Karena itu *margi agung* bersifat sakral, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan *Ida Betara* tidak boleh tersentuh atau dilalui oleh sesuatu yang mengandung kotoran.

4. Makna Simbolik Angkul-angkul

Pada umumnya *karang* perumahan tradisional Bali dikelilingi oleh tembok *penyengker* yang berfungsi sebagai batas antara *karang* perumahan dan *karang sisa* yang berada diluarnya. Secara niskala, *penyengker* berfungsi pula untuk menangkal segala gangguan yang datang dari luar, terutama dari orang-orang yang tidak suka pada penghuni rumah tersebut.

Selain tembok *penyengker* perumahan tradisional Bali juga terdapat *angkul-angkul* yang berfungsi sebagai tempat *pemesuan* tetapi juga bermakna sebagai penjaga keselamatan, sebagai implementasi ajaran Hindu dan juga mempunyai makna simbolik sebagai (1) tujuan hidup yaitu menuju *moksartham jagadhitaya ca iti dharmah* (kehidupan manusia lahir bathin tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan yang kekal dan abadi yang disebut *moksa*);(2) sebagai simbol kemanunggalan *bhuwana agung* dan *bhuwana alit* (3) sebagai pengejawantahan ajaran *samkhya*;(4) simbol stratifikasi sosial.

5. Konsep Penataan Margi Agung

Dengan pola linier, maka *margi agung* akan merupakan pusat orientasi, sehingga jalan-jalan yang lebih kecil akan bermuara di *margi agung*. *Margi agung* bukan saja sebagai pusat orientasi tetapi juga merupakan daerah sakral, harus dapat memisahkan antara yang bersifat profan dan yang bersifat sakral. Untuk itu akan ditata kembali kawasan *margi agung* sebagai berikut:

- Kawasan *margi agung* hanya akan dimanfaatkan sebagai areal sakral terutama untuk mengadakan prosesi upacara, sehingga dengan demikian kesucian *margi agung* akan dapat dipertahankan dan tidak akan menodai kesucian pura secara keseluruhan.
- Pengalihan fungsi sebagian *margi agung* akan dimanfaatkan sebagai daerah pejalan kaki baik wisatawan maupun penghuni pemukiman kawasan *margi agung*.
- Daerah hunian di sepanjang *margi agung* ini akan tetap difungsikan sebagai tempat berjualan cinderamata, sehingga akan menambah kenyamanan wisatawan dan menambah pendapatan penghuni kawasan *margi agung*. Pintu keluar masuk penghuni dari rumah sepanjang *margi agung* menuju *margi agung*, akan digunakan *pemesuan angkul-angkul* atau sejenisnya menurut ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperlihatkan kebudayaan yang mendukung kawasan.

SIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

- Margi agung* merupakan pusat orientasi bagi pemukiman sekitar *margi agung*, sehingga semua aktivitas penduduk hunian, akan bermuara di *margi agung*.
- Margi agung* adalah tetap merupakan ruang sakral, yang harus tetap dijaga kesuciannya, sehingga hal-hal yang menyebabkan *kelelahan* dapat dihindarkan dari *margi agung*.
- Penataan pemukiman sekitar *margi agung* akan memakai pola linier dimana *margi agung* merupakan sumbu utama utara

selatan, sedangkan sumbu sekunder baik utara selatan, timur barat dibuat menurut kebutuhan.

4. *Angkul-angkul* sebagai tepat keluar masuk rumah ditata menurut aturan yang berlaku dan diarahkan untuk lebih bertujuan mencapai kebahagiaan.
5. Kios-kios yang berada disepanjang *margi agung* ditata kembali sehingga dapat menunjang kenyamanan pengunjung dan kesucian kawasan.

SARAN

Beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pemukiman tetap dijaga kelestariannya, dan tidak ada pengembangan kembali setelah penataan.
2. *Margi agung* tetap dijaga kesakralan dan kesuciannya, sehingga tidak menodai kesucian kawasan.
3. *Angkul-angkul* sebagai elemen ruang luar dipertahankan untuk menunjang kemegahan *margi agung*.
4. Pelaksanaan pengembangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, dengan mengikutsertakan umat secara menyeluruh serta lembaga adat dan keagamaan yang ada.
5. Tindak lanjut pengelolaan *margi agung* setelah penataan, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui lembaga adat dan keagamaan setempat dalam rangka tetap menjaga kelestarian, kesakralan, kejegan *margi agung* itu sendiri serta Pura Besakih secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

..... 1987. *Konsep Agama Hindu dalam Arsitektur Tradisional*. Majalah Ilmiah Populer Widyasrama, Denpasar: Universitas Dwijendra.

Bagoes, I Gusti Ngurah. 1980. *Kebudayaan Bali (dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia)*. Koentjaraningrat (ed) Cetakan V. Jakarta: Jembatan.

Kaler, I Gusti Ketut. 1982. *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali Jilid 2*. Denpasar: Bali Agung.

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.

Lynch, Kevin. 1960. *The Image of the City*. Massachussetts: The MIT Press.

Poespowardoyo, Soerjanto. 1993. *Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Purwita, Ida Bagus Putu. 1984. *Inti Hakekat Agama Hindu, dalam Rangka Kegiatan Sabha Arsitektur Bali*. Denpasar: Pusat Informasi Teknik Bangunan, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali.

Sanderson, Stephen K. 1995. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial (Edisi 2)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rata Grafindo Persada.

Titib, I Made. 1993. *Pedoman Sembahyang dan Tirthayatra bagi Umat Hindu*. Denpasar: Upada Sastra.

Tonjaya. 1982. *Lintasan Asta Kosali*. Denpasar: Toko Buku Ria.

Trancik, Roger. 1986. *Finding Lost Space*. Canada: Van Nostrand Reinhold Company.

Triguna, Ida Bagus Gede Yudha. 1993. *Sosiologi Hindu*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha dan Universitas Terbuka.

Wiana, I Ketut. 1985. *Acara III*. Denpasar: Cetakani.

Windhu, Ida Bagus Oka. 1976/1977. *Bangunan Tradisional Bali Serta Fungsinya*. Denpasar: Proyek Sasana budaya Bali.

Wiratmadja, I Gusti Ketut Adia. 1977. *Agama Hindu, Sejarah dan Sradha*. Tidak dipublikasikan.